



**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI EMPIRIS DI DESA CIGUDEG, SUKARAKSA, DAN WARGAJAYA
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR)**

Skripsi

Diajukan oleh :

Dian Rahmanoviyani

0221 18 094

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JULI 2022



**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI EMPIRIS DI DESA CIGUDEG, SUKARAKSA, DAN WARGAJAYA
KABUPATEN BOGOR)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. H. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CSEP., QIA)





**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI EMPIRIS DI DESA CIGUDEG, SUKARAKSA, DAN WARGAJAYA
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari : Selasa, 26 Juli 2022

Dian Rahmanoviyani

0221 18 094

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang

(Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., Msi., CMA., CAPM., CAP)

Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. H. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CSEP., QIA)

Anggota Komisi Pembimbing

(Dessy Herlisnawati, SE., Msi., CAP)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Rahmanoviyani

NPM : 022118094

Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Di Desa Cigudeg, Sukaraksa, Dan Wargajaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 28 Juli 2022



Dian Rahmanoviyani

0221 18 094

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

DIAN RAHMANOVIYANI. 0221 18 094. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Di Desa Cigudeg, Sukaraksa, Dan Wargajaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor). Di bawah bimbingan : ARIEF TRI HARDIYANTO dan DESSY HERLISNAWATI. 2022

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas diantaranya kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian dilakukan di tiga desa yaitu Cigudeg, Sukaraksa, dan Wargajaya dengan menyebarkan kuesioner kepada 24 responden. Metode analisis yang digunakan adalah verifikatif dengan metode penelitian explanatory survey. Pengujian dengan menggunakan SPSS vers 25, uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji hopetesis menggunakan uji statistik F, uji statistik t dan uji koefisien determinasi (adjusted R²).

Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama memiliki berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Kata Kunci : kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kekuatan, semangat, dan juga pikiran yang kuat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan sepanjang masa pembawa syafaat bagi umatnya di hari akhir nanti. Atas Rahmat-Nya pula skripsi ini dapat terselesaikan yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”**. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan juga inspirasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Tony Suhartono dan Ibu Nurhaya, Kaka dan adikku Teteh Fatia Rahmasari dan Regita Rahmadanti, Juga keponakanku tersayang Shakyla Azzalea Qaireen dan Shafrina Azkayra Naureen.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
4. Bapak Dr. H. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CSEP., QIA Selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Ibu Dessy Herlisnawati, SE., Msi., CAP Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi.
6. Mohamad Arief Santya Budi yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil maupun do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Qishoh Afifah Hasanudin, Nasihatul Masmuah, dan Choerunnisa selaku teman yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dan terima kasih kepada diri sendiri karena telah melakukan yang terbaik, tidak menyerah, dan selalu sabar. *Hey, good job. You finally got through it all and i'm very proud of you!*

Penulis menyadari bahwa dalam proposal ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk hal yang lebih baik. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, 28 Juli 2022

Penulis

Dian Rahmanoviyani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.1 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	7
1.1.1 Identifikasi Masalah	7
1.1.2 Perumusan Masalah	7
1.2 Maksud Dan Tujuan Penelitian	8
1.2.1 Maksud Penelitian	8
1.2.2 Tujuan Penelitian	8
1.3 Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Kegunaan Praktis	8
1.3.2 Kegunaan Akademis/Teoritik	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Akuntansi	9
2.1.1 Definisi Akuntansi Menurut Para Ahli	9
2.1.2 Akuntansi Keuangan	10
2.1.3 Fungsi Akuntansi Keuangan	10
2.2 Kompetensi Aparatur Desa	11
2.2.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Desa	11
2.2.2 Unsur-unsur Kompetensi Aparatur Desa	12
2.3 Sistem Pengendalian Internal	12
2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal	12
2.3.2 Tujuan Pengendalian Internal	13

2.3.3 Unsur-Unsur Pengendalian Internal.....	14
2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	15
2.4.1 Pengertian Akuntabilitas	15
2.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.4.3 Unsur-unsur Akuntabilitas Keuangan Desa	16
2.5 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	17
2.5.1 Penelitian Sebelumnya	17
2.5.2 Kerangka Pemikiran.....	23
2.6 Hipotesis Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	27
3.4 Operasionalisasi Variabel	27
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	29
3.6 Metode Pengumpulan Data	30
3.7 Metode Pengolahan/Analisis data	31
3.7.1 Uji Statistik Deskriptif	31
3.7.2 Uji Kualitas Data.....	32
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	32
3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	33
3.7.5 Uji Hipotesis Penelitian	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum	35
4.2 Deskripsi Responden.....	36
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	36
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	36
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	37
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	38
4.3 Statistik Deskriptif	38
4.4 Uji Kualitas Data.....	39
4.4.1 Uji Validitas	39

4.4.2 Uji Reliabilitas	42
4.5 Uji Asumsi Klasik	42
4.5.1 Uji Normalitas	42
4.5.2 Uji Multikolinearitas	43
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	44
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	45
4.7 Pengujian Hipotesis.....	46
4.7.1 Uji Statistik F (Uji Signifikan Simultan)	46
4.7.2 Uji Stastik t (Uji Signifikasi Parsial).....	47
4.7.3 Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	48
4.8 Pembahasan.....	49
4.8.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	49
4.8.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	50
4.8.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Cigudeg, Sukaraksa, dan Wargajaya Kabupaten Bogor.....	2
Tabel 2. <i>Research Gap</i> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	6
Tabel 3. Penelitian Sebelumnya.....	17
Tabel 4. Operasionalisasi Variabel	29
Tabel 5. Jumlah Aparatur Desa.....	30
Table 6. Distribusi Kuesioner	35
Tabel 7. Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 8. Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia.....	36
Tabel 9. Pengelompokan Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	37
Tabel 10. Pengelompokan Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	38
Tabel 11. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 12. Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur Desa (X1).....	40
Table 13. Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X2)	41
Tabel 14. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).....	41
Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas.....	42
Tabel 16. Hasil Uji Normalitas	43
Tabel 17. Hasil Uji Multikolinearitas	44
Tabel 18. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	45
Tabel 19. Hasil Uji Statistik F (Uji Signifikan Simultan).....	47
Tabel 20. Hasil Uji Statistik t (Uji Signifikasi Parsial).....	47
Tabel 21. Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R</i> ²)	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	24
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	60
Lampiran 2. Dokumentasi Penyebaran Kuesioner.....	65
Lampiran 3. Data Mentah Penelitian	66
Lampiran 4. Hasil Output SPSS 25.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era reformasi sekarang ini Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan negara untuk mengubah Sistem Pemerintahan dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi. Desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diberikan pusat kepada daerah. Salah satu bentuk desentralisasi yang dilakukan adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dan kepala daerah. Sistem desentralisasi ini semakin menuntut pemerintah daerah untuk memperlihatkan pencapaian keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat.

Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pengetahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Hal ini menjadikan desa memiliki peranan yang strategis khususnya dalam pelayanan bidang publik. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan otonomi daerah, desa perlu diberikan kewenangan yang lebih besar serta didukung dengan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memunculkan sebuah era reformasi sebagai langkah awal menciptakan kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan menggunakan uang maupun segala sesuatu yang dapat berupa uang ataupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam urusan keuangan, pemerintah desa wajib untuk menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember (BPKP,2016).

Sumber keuangan desa dapat berasal dari : (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), (3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, (4) Alokasi Dana Desa, (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Kabupaten/Kota, (6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga, dan (7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah (UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72). Penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mengelola keuangan desa harus didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan juga dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembentukan Peraturan Daerah serta pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu cara untuk setiap daerah mengatur daerahnya sendiri serta memberikan kesempatan bagi daerah dalam upaya peningkatan pembangunan dan pengembangan potensi yang dimiliki setiap daerah. Melalui otonomi daerah, diharapkan desa mampu melaksanakan pemerintah dengan sikap yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, dan mampu bertanggung jawab agar dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagai subyek dari pembangunan. Hal ini didukung dengan adanya pemberian anggaran untuk setiap desa yang ditujukan untuk meningkatkan kontribusi desa terhadap pembangunan.

Berkaitan dengan keuangan desa khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Fenomena terjadi di desa Cigudeg, Sukaraksa dan Wargajaya dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut rincian APBDes yang dimiliki desa Cigudeg, Sukaraksa, Dan Wargajaya :

Tabel 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Cigudeg, Sukaraksa, dan Wargajaya Kabupaten Bogor

Anggaran	Desa		
	Cigudeg	Sukaraksa	Wargajaya
Pendapatan			
1. Pendapatan Asli Usaha Desa	Rp 6.000.000,-	-	-
2. Pendapatan Transfer	Rp 2.769.087.648,-	Rp 3.563.218.521,-	-
3. Dana Desa	Rp 1.230.779.000,-	Rp 1.581.786.000,-	Rp 1.320.296.000,-
4. Alokasi Dana Desa	Rp 923.420.615,-	Rp 902.146.816,-	Rp 733.450.492,-
5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp 334.888.033,-	Rp 249.285.705,-	Rp 317.319.365,-
6. Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi	Rp 130.000.000,-	Rp 130.000.000,-	Rp 130.000.000,-
7. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp 150.000.000,-	Rp 700.000.000,-	Rp 150.000.000,-
Total	Rp 2.775.087.648,-	Rp 3.563.218.521,-	Rp 2.651.065.857,-

Belanja			
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1.115.108.648,-	Rp 1.144.528.075,-	Rp 810.759.857,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 622.244.600,-	Rp 1.846.642.080,-	Rp 863.109.600,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 117.800.000,-	Rp 141.129.000,-	Rp 256.660.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 150.000.000,-	Rp 20.519.400,-	-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa	Rp 773.384.400,-	Rp 410.400.000,-	Rp 720.536.400,-
Total	Rp 2.778.537.648,-	Rp 3.563.218.555,-	Rp 2.651.065.857,-
Surplus/ (Defisit)	(Rp 3.450.000,-)	(Rp 34,-)	-

Sumber : Kantor Desa Cigudeg, Sukaraksa, dan Wargajaya

Tabel 1. Menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Cigudeg untuk Anggaran Pendapatan sebesar Rp 2.775.087.648, dan untuk Belanja sebesar Rp 2.778.537.648 dimana desa Cigudeg mengalami Defisit atau kondisi saat pengeluaran lebih besar dari pendapatan yaitu sebesar Rp 3.450.000. Hal tersebut juga terjadi pada desa Sukaraksa yang memiliki Anggaran Pendapatan sebesar Rp 3.563.218.521 dan Belanja sebesar Rp 3.563.218.555 yang mengalami Defisit sebesar Rp 34. Sedangkan untuk desa Wargajaya tidak mengalami surplus ataupun defisit karena total pendapatan dan total belanja sebesar Rp 2.651.065.857. Dalam realisasi APBDes Tahun 2020 pada desa Cigudeg, Sukaraksa dan Wargajaya terlihat bahwa dana tersebut sudah dipergunakan dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta digunakan untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. APBDes secara khusus diberikan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah desa yang mandiri dan mengurangi desa tertinggal.

Aparatur desa adalah unsur penyelenggara desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang cukup memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintah. Dalam mencapai tujuan organisasi, aparatur desa harus memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup baik untuk memenuhi kewajibannya. Salah satu tugas aparatur desa adalah mengelola keuangan desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dipergunakan sebagai pembangunan desa berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah harus bisa menerapkan prinsip tersebut, dimana nanti hasil akhir dari semua kegiatan dan aktivitas penyelenggaraan

pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sehingga akan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017) Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah yang dikenal sebagai kepala desa dan para aparatur untuk dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dan dapat memberikan tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa aparatur desa telah bekerja dengan sangat baik, benar, etis dan juga bertanggung jawab atas aktivitas dan kegiatan dalam mengelola keuangan desa. Semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, maka kinerja pada instansi pemerintahan akan semakin meningkat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan sangat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi fokus penting bagi aparatur desa sebab hal ini dapat menunjukkan tanggung jawab serta keberhasilan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.

Sangat penting bagi pemerintah daerah khususnya aparatur desa untuk selalu memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, karena dengan adanya akuntabilitas maka akan membuat tatanan pemerintah daerah menjadi lebih baik dan juga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang akan dilaksanakan. Sehingga, adanya hal yang sangat menarik yang perlu dibahas selanjutnya adalah mengenai apa sajakah faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa?

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena jika sumber daya manusia tidak terlibat maka laporan keuangan yang berkualitas tidak akan mampu terealisasi (Ferina, 2016). Kompetensi merupakan syarat utama agar akuntabilitas desa dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga kompetensi aparatur menjadi suatu faktor yang penting untuk dibahas mengingat kompetensi merupakan faktor internal yang penting. Kompetensi aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola alokasi dana desa (ADD) yang terbilang cukup besar (Widyatama, *et al.*, 2017).

Menurut Wahyuning, *et al.*, (2020) Kompetensi yang dimiliki aparatur desa akan menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel. Aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan desa akan mudah dalam menjalankan tugas yang diberikan. Peran aparatur yang berkompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan manfaat yang optimal untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan dalam mengelola keuangan desa tidak terlepas dari aspek pengelola keuangan yang di kelola oleh pihak yang memiliki manajemen yang baik. Oleh karena itu, kompetensi aparatur yang terlibat dalam urusan mengelola keuangan desa sangat perlu diperhatikan.

Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi, menghindari segala bentuk penyimpangan yang terjadi dalam mengelola keuangan desa. Aparatur yang berkompeten memiliki karakteristik yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang baik. Menurut beberapa ahli, kompetensi adalah karakteristik yang menjadi dasar bagi seseorang untuk mampu mencapai kinerja yang baik dan tinggi dalam pekerjaannya. Aparatur yang tidak memiliki karakteristik yang cukup baik akan tersendat-sendat dalam melakukan pekerjaannya yang akan mengakibatkan pemborosan terhadap bahan, waktu dan juga tenaga.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) membuktikan bahwa kompetensi aparatur pengelola keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mada, *et al.*, (2017); dan Tarjo (2019) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi aparatur pengelola keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal juga diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pengendalian atas kegiatan yang dilakukan sangat diperlukan. Pengendalian yang dilakukan akan berpedoman pada sistem pengendalian pemerintah (SPIP). SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fungsi sistem pengendalian digunakan sebagai tolak ukur untuk menguji efektivitas penyelenggaraan suatu aktivitas di dalam organisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, dan kejelasan kriteria dalam pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi.

Sistem Pengendalian Internal berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, sehingga sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang penting terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh aparatur untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal merupakan rancangan sistem untuk digunakan sebagai suatu kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Unsur sistem pengendalian internal yang berfungsi digunakan sebagai pedoman dan tolak ukur dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Dalam pengembangan unsur sistem pengendalian diperlukan

pertimbangan yang memperhatikan aspek biaya dan manfaat (*Cost and Benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria mengukur efektivitas dalam perkembangan teknologi informasi yang dilakukan secara komperhensif.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan pada data akuntansi. Dengan adanya sistem akuntansi, maka resiko terjadinya penyimpangan atau kekeliruan dalam pencatatan maupun perhitungan dapat diminimalisasi sehingga akan mengurangi kemungkinan pemerintah mengalami kekeliruan. Sistem pengendalian yang dirancang dengan berkualitas akan bekerja dengan baik apabila bagian yang terintegrasi dengan sistem dapat beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Hasil penelitin terdahulu yang dilakukan oleh Aziiz dan Prastiti (2019) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi akuntabilitas dana desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Karyadi (2019); dan Mualifu, *et al.*,(2019) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2.

Research Gap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Variabel Dependen	Variabel Independen	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Kompetensi Aparatur Desa (X ₁)	Atiningsih dan Ningtyas (2019); Mada, <i>et al.</i> ,(2017); dan Tarjo (2019)	Berpengaruh Signifikan
		Widyatama, <i>et al.</i> , (2017)	Tidak Berpengaruh Signifikan
	Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	Aziiz dan Prastiti (2019); Karyadi (2019); dan Mualifu, <i>et al.</i> ,(2019)	Berpengaruh signifikan
		Pahlawan <i>et al.</i> ,(2020)	Tidak Berpengaruh Signifikan

Sumber : Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2 menyajikan *Research Gap* yang menunjukkan bahwa masih terdapat celah (*gap*) pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini membuat peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai topik permasalahan tersebut ke dalam penelitian yang dilakukan terhadap tiga desa yang telah di pilih.

Alasan peneliti memilih penelitian pada tiga desa di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor yaitu Desa Cigudeg, Sukaraksa, dan Wargajaya adalah karena adanya ketebatasan peneliti dalam menjangkau seluruh desa. Selain itu, sebelumnya belum ada peneliti yang melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan di tiga desa tersebut, sehingga penelitian ini sangat dibutuhkan untuk dapat mengetahui

ataupun membuktikan seberapa signifikan pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut yang merupakan susunan pemerintahan terkecil yang berkaitan langsung dengan warga negara. Nilai akuntabilitas sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai garda terdepan yang berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara dengan baik untuk digunakan sebagai pelayanan publik.

Sangat penting bagi pemerintah daerah terutama bagi para aparatur desa yang bekerja dalam memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut karena dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas maka tatanan kelola pemerintahan yang efisien serta berkualitas akan tercipta dan berjalan dengan sangat baik. Selain itu, hal yang timbul dari diterapkannya prinsip akuntabilitas akan dapat menarik perhatian publik dalam meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul penelitian “**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Cigudeg, Sukaraksa, dan Wargajaya**”.

1.1 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang terjadi adalah permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Selain itu, penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel harus didukung dengan adanya sistem pengawasan.

1.1.2 Perumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

1.2 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan penulisan proposal penelitian ini, terkait dengan masalah pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan sampel dari 3 (tiga desa) yaitu Desa Cigudeg, Sukaraksa, dan Wargajaya.

1.2.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.3 Kegunaan Penelitian

1.3.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan dan juga sebagai bahan pertimbangan yang berguna bagi aparatur desa dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang lebih baik sehingga dapat mengambil kebijakan untuk peningkatan akuntabilitas pemerintah desa.

1.3.2 Kegunaan Akademis/Teoritik

- a. Bagi penulis, dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan kuliah dengan kenyataan yang ada di perusahaan dan juga menambah pengetahuan yang sifatnya baru, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan.
- b. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber bacaan yang dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- c. Bagi desa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis yang dapat memberitahukan mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Akuntansi berasal dari Bahasa Inggris *To Account*, yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti menjelaskan, menerangkan, atau mempertanggungjawabkan. Kata akuntansi berasal dari serapan kata *accountancy* yang mempunyai arti segala sesuatu yang merupakan tanggung jawab seorang *accountant* (akuntan) dalam menjalankan profesinya (Ardianto, 2019:1).

Konsep dasar akuntansi merupakan berbagai konsep yang telah dijadikan sebagai rujukan standar dalam menyampaikan laporan keuangan. Konsep dasar akuntansi sangat dibutuhkan untuk dapat mempelajari bagaimana pengolahan keuangan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Dengan adanya konsep dasar akuntansi, maka pengolahan data keuangan akan dapat terjamin berjalan dengan baik.

Secara umum, Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mencatat transaksi, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi dari berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan menjadi informasi yang dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan sebuah keputusan. Akuntansi juga merupakan suatu ilmu yang di dalamnya berisi tentang bagaimana proses pemikiran sehingga dihasilkan suatu kerangka konseptual yang mencakup prinsip, standar, metode, dan teknik, serta prosedur yang nantinya dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaporan keuangan dan informasi-informasi lainnya untuk melaporkan keadaan keuangan dari suatu kesatuan usaha.

Dari penjelasan mengenai akuntansi, penulis menyimpulkan bahwa Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat menyediakan informasi berupa laporan keuangan yang rapi dan mudah dipahami mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi organisasi atau perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dari sudut pandang kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi atau perusahaan.

2.1.1 Definisi Akuntansi Menurut Para Ahli

Berbagai definisi akuntansi yang dikemukakan oleh para ahli atau pihak-pihak yang terkait dengan perkembangan akuntansi sebagai berikut :

Menurut Muhammad Gade (2005) dalam Ardianto (2019:3) “Akuntansi adalah ilmu pengetahuan terapan dan seni pencatatan yang dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan sistem tertentu, mengolah, dan menganalisis catatan tersebut sehingga dapat disusun suatu laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pimpinan organisasi atau lembaga terhadap kinerjanya”.

Menurut American Accounting Association (AAA) dalam Zamzami dan Nusa (2017:2) “*Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision by users of the information*”. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan suatu informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas terhadap pihak pengguna informasi tersebut.

Selain itu, menurut America Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam Zamzami dan Nusa (2017:2),” *Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and terms of money, transaction and events which are, in part at least, of financial character, and interpreting the result there of*”. Akuntansi adalah sebuah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya.

2.1.2 Akuntansi Keuangan

Menurut Kieso (2013) Akuntansi Keuangan merupakan proses dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seorang akuntan dengan penyusunan laporan keuangan menggunakan standar akuntansi untuk kepentingan pihak ketiga. Standar pada akuntansi diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dapat mencatat, mengikhtisarkan, dan melaporkan seluruh hasil dari aktivitas perusahaan.

Laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), laporan laba-rugi, dan laporan arus kas. Laporan Keuangan harus disajikan secara periodik berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP). Proses dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seorang akuntan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.

2.1.3 Fungsi Akuntansi Keuangan

Fungsi utama dari akuntansi keuangan adalah memelihara catatan atas transaksi-transaksi dan menyiapkan laporan-laporan berkala atas usaha tersebut. (Ardhianto,2019:16). Dalam menyajikan informasi keuangan kepada publik, akuntansi keuangan harus tunduk kepada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum dan praktik-praktik secara universal. Oleh karena itu laporan keuangan harus disusun dan disajikan dengan bahasa, istilah-istilah, prosedur, dan menggunakan metode yang sama, sehingga para pemakai laporan keuangan mampu menggunakannya untuk kepentingan masing-masing. Dengan demikian informasi

keuangan akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan pihak manajemen untuk keadaan kedepannya.

Laporan keuangan disusun guna menyediakan informasi terkait dengan posisi keuangan perubahan posisi keuangan, dan kinerja suatu entitas sehingga laporan keuangan tersebut memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi atau perusahaan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan pencatatan atas laporan keuangan.

2.2 Kompetensi Aparatur Desa

2.2.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Desa

Organisasi dibentuk sebagai wadah ataupun tempat untuk sebuah perkumpulan yang memiliki tujuan tertentu. Ketika tujuan organisasi tercapai, maka hal tersebut merupakan sebuah keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan, perlu adanya sebuah landasan yang kuat berupa kompetensi kepemimpinan, kompetensi pekerja, dan budaya organisasi yang mampu memperkuat dan memaksimalkan kompetensi. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Sumber daya manusia dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dalam organisasi. Penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh manusia dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan semaksimal mungkin tanpa melihat latar belakang agar dapat mengembangkan kompetensi mereka, hal tersebut akan menjadi sebuah nilai bagi sumber daya manusia.

Menurut Hevesi (2005) dalam Atiningsih dan Ningtyas (2019) Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang menjadi dasar seseorang melakukan pencapaian kinerja pekerjaan yang cukup tinggi. Jika aparat pengelola dana desa tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam bekerja, maka pekerjaan yang dilakukan akan tersendat-sendat yang akan mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan juga tenaga. Artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

Kompetensi di tempat kerja sebagai bentuk kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan maupun pengetahuan dalam situasi yang disepakati untuk dapat menghasilkan manfaat dan tingkat kinerja yang memuaskan. Dengan adanya kompetensi akan menunjukkan karakteristik keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas profesionalisme dalam melakukan pekerjaan. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Yang menjadi kata dasarnya sendiri yaitu kompeten yang artinya cakap,

mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik individu yang membuatnya berhasil dalam melakukan pekerjaan (Widyatama, 2017).

Menurut Sutrisno (2017) Sumber daya manusia yang andal dalam sebuah organisasi dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas, hal tersebut dilakukan karena sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Terkait pengelolaan dana desa, aparatur desa yang memumpuni sangat diperlukan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa, karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa akan dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut, dan begitu juga sebaliknya jika aparatur desa tidak berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka akuntabilitas tidak akan tercapai (Umaira dan Adnan, 2019).

Kompetensi aparatur desa dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik aparatur desa seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya, sehingga aparatur tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional, efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas kerja (Defi,2021).

2.2.2 Unsur-unsur Kompetensi Aparatur Desa

Aparatur pemerintah yang berkualitas tentunya adalah tolak ukur yang dapat dijadikan patokan atau perbandingan agar bisa mengetahui sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi aparatur desa. Sedarmayanti (2014) dalam Defi (2021) menjelaskan unsur-unsur dalam Kompetensi Aparatur Desa adalah sebagai berikut :

a. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan (Knowledge) adalah fakta, kebenaran, atau informasi yang dimiliki oleh seseorang pada bidang tertentu atau hanya pada area tertentu.

b. Keterampilan (Skill)

Keterampilan (Skill) adalah kapasitas kemampuan atau keahlian teknis yang dibutuhkan untuk dapat melakukan dan menjalankan tugas tertentu baik secara fisik atau mental untuk nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

c. Kemampuan (Ability)

Kemampuan (ability) adalah kapasitas kecakapan atau keahlian inisiatif dalam bekerja yang dimiliki oleh seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

2.3 Sistem Pengendalian Internal

2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh aparatur untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan”. Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya. Sedangkan untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang dilakukan dilingkungan pusat ataupun daerah secara menyeluruh. Menurut Rita Martini, *et al.*, (2019) SPIP berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif.

Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal.

Menurut Karyadi (2018) Pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang dirancang untuk dapat memberikan sebuah jaminan guna tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektifitas dan efisien dalam operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan hukum yang berlaku. Para manajer harus dapat menilai sistem internal agar dapat bertanggung jawab atas pengendalian internal terhadap pengelolaan laporan keuangan. Perancangan sistem merupakan hal yang penting dalam memahami pengendalian internal agar dapat menilai resiko dan menurunkan resiko dalam mencapai tujuan.

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai APBD. Pengawasan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan menilai dan meningkatkan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola.

2.3.2 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan sebuah keyakinan yang memadai mengenai kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, menurut Mahmudi (2011:252) tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal adalah :

- a. Melindungi aset negara baik aset fisik maupun aset data
- b. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
- c. Menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- d. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi
- f. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.3.3 Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Unsur–unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dimana sebuah instansi pemerintah dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah harus dapat menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dengan menerapkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Unsur ini menekankan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib untuk melakukan penilaian risiko yang dihadapi di dalam maupun di luar instansi.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan yang memiliki otorisasi yang cukup memadai untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen untuk merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut efektif.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan prosedur yang dibangun untuk menyediakan dan juga memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan merupakan proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal yang dilakukan dalam satu periode tertentu. Unsur ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, maka akan sangat dibutuhkan akuntabilitas yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal tersebut diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan cara menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Yunita dan Christianingrum (2019) menyatakan bahwa penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas aktivitas dan kinerja pemerintah mengenai apa yang telah, sedang dan direncanakan yang nantinya akan dilakukan oleh organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Lilis dan Cecep (2020) Pengelolaan dana desa yang baik akan sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi yang erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas terutama masyarakat yang berada di daerah pedesaan, hal tersebut sangat penting bagi aparatur desa untuk mengelola dana desa sesuai dengan kebijakan yang berlaku agar tercapainya seluruh tujuan organisasi.

Akuntabilitas atau juga disebut dengan pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk yang mengharuskan seseorang memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala bentuk aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah yang memiliki hak untuk meminta tanggung jawab tersebut (Sri Ayem,2020). Pada dasarnya tujuan akuntabilitas adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan social (Mualifu,2019).

Akuntabilitas menjadi salah satu unsur pokok untuk mewujudkan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Hasil dari program yang telah dilaksanakan harus dilaporkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas merupakan bentuk dari kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan serta menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang telah dilaksanakan, serta dapat dipertanggungjawabkan

terhadap kinerja dan tindakan. Hal ini dapat menjadikan akuntabilitas sebagai tolak ukur bagi aparatur desa atas tanggung jawab mereka terhadap pekerjaannya. Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau kompetensi maka akan sulit bagi organisasi dalam mencapai tujuan (Astri *et al.*, 2017).

Alasan pentingnya akuntabilitas juga dikemukakan oleh Crowe (2011) dalam Irma (2017), adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas memberikan legitimasi bagi para pengambil keputusan jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka bersedia publik untuk membenarkan dan ditantang pada keputusan mereka
- b. Akuntabilitas memberikan kredibilitas dan bukti sebagai dasar keputusan
- c. Akuntabilitas memiliki utilitas - jika itu nyata dan berarti, akuntabilitas menyediakan dasar untuk mengubah dan meningkatkan pelayanan

2.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Asas-asas dari pengelolaan keuangan desa terdiri dari :

- a. Transparan, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan mendapatkan akses untuk informasi yang luas tentang keuangan desa
- b. Akuntabel, adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya maupun pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- c. Partisipatif, adalah proses penyelenggaraan pemerintah desa yang melibatkan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
- d. Tertib dan disiplin, adalah pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.4.3 Unsur-unsur Akuntabilitas Keuangan Desa

Menurut Mada, *et al.*, (2017) unsur-unsur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

- a. Kejujuran dan Hukum

Kejujuran dan hukum merupakan suatu kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan terbuka mengenai informasi, serta menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana desa harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

b. Proses

Proses merupakan penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban yang dilakukan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Dengan adanya informasi yang cukup memadai, maka ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan akan dapat tercapai.

2.5 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Sebelumnya

Dari hasil penelitian yang telah diteliti, maka peneliti akan membandingkan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan judul penelitian yang hamper sama yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas (2019) "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)"	Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X ₁) Partisipasi Masyarakat (X ₂)	Pemahaman tentang akuntansi, SDM yang berkualitas, Sumber daya yang Memadai, Peran dan tanggung jawab, Pelatihan keahlian dalam tugas, Sosialisasi peraturan baru, Pemahaman tentang struktur organisasi Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program	Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

			desa, Mengusulkan rencana anggaran, Terlibat dalam rapat paripurna, Terlibat mengawasi dan melaporkan, Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran, Memberikan penghargaan		
		Sistem Pengendalian Internal (X ₃)	Kejujuran dan keterbukaan informasi, Kepatuhan dalam pelaporan, Kesesuaian prosedur, Kecukupan informasi, Ketepatan penyampaian laporan		
		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Sikap bertanggung jawab atas kinerja atau tindakan dalam pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penata usaha dan pertanggung jawaban keuangan		

			desa.		
2	Arief Widyatama, Lola Novita, dan Diarespati (2017) “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)”	Kompetensi (X ₁)	Pengertian , keterampilan, dan sikap	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan ADD, dan sistem pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD
		Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	Pertimbangan catatan hasil pekerjaan, pengawasan terhadap bawahan yang langsung melaporkan hasil pekerjaannya , mengamati bawahan dalam melakukan tugasnya, per-timbangkan hasil pekerjaan, fokus pada hasil daripada bagaimana bawahan melakukan kegiatan, pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan, prosedur operasi standar dalam melakukan pekerjaan, lebih		

			menekankan hasil daripada proses untuk mendapatkan hasil.		
		Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Y)	Kuantitas, kualitas, waktu, biaya, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama		
3	Karyadi, Muh (2018) “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Di kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek)”	Sistem Pengendalian Intern (X_1)	Lingkungan pengendalin, Penilaian resiko, Aktifitas pengendalian , Informasi dan komunikasi, dan pemantauan	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, dan Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan, sedangkan untuk Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak berpengaruh terhadap
		Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)	Komputer dan Internet		
		Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3)	Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap		

		Akuntabilitas Keuangan Desa (Y)	Perencanaan, Pelaksanaan, Penata usahaan, Pelaporan dan pertanggung jawaban		Akuntabilitas keuangan Desa
4	Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan (2019) “Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”	Transparansi (X ₁)	Keterbukaan informasi yang jelas	Uji Reliabilitas, Uji Normalitas Data, Uji multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Desa
	Kompetensi (X ₂)	Pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan			
	Sistem Pengendalian Internal (X ₃)	Struktur organisasi, cara-cara, dan alat-alat yang dikordinasikan di dalam suatu perusahaan atau instansi untuk menjaga keamanan harta (<i>asset</i>) milik perusahaan atau instansi			
	Komitmen Organisasi (X ₄)	Loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan dan menerima terhadap nilai-nilai serta tujuan organisasi			

		Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Desa (Y)	Pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap undang-undang.		
5	Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, dan Dania Puspitasari (2018) “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)”	Peran Perangkat Desa (X ₁)	Mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumberdaya yang dimiliki secara tepat dan mudah	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, Uji multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari pengujian hipotesis membuktikan bahwa Peran Perangkat Desa, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
	Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	Kegiatan yang tepat dan mudah, pelaporan keuangan yang baik, keamanan aset negara, dan tertib pada peraturan perundang-undangan			
	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	Bertanggung jawab atas semua tugas dan kewajiban yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku			

2.5.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk kerangka berpikir mengenai hubungan antar variabel yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian. Kerangka yang sempurna akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel independen dan dependen yang dijadikan sebagai objek penelitian. Jika dijelaskan secara teoritis hubungan antar variabel dependen dan independen, maka penyusunan paradigma harus didasari dengan kerangka berpikir.

a. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Nur Aziz dan Dwi Prastiti (2019) mengatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan yang terdapat dalam diri individu untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, maupun kewenangan guna mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya keterlibatan sumber daya manusia maka laporan keuangan yang berkualitas akan mampu terealisasi. Artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mada, *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten Gorontalo. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Tarjo (2019) yang berhasil membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di desa Muara Niro kabupaten Tebo.

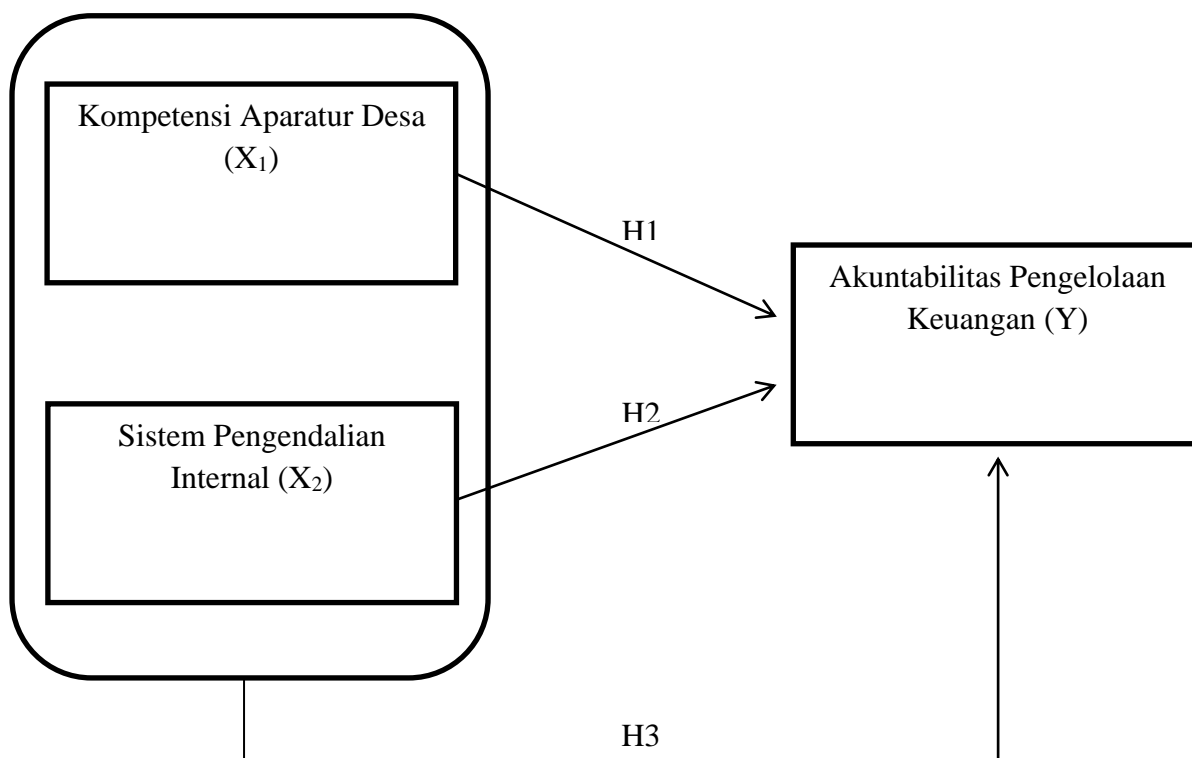
b. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Karyadi (2018) Pengendalian Internal adalah suatu proses untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan pencapaian tujuan yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – Undangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rita Martini, *et al.*, (2019) mengatakan bahwa untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pedoman yang digunakan sebagai penyelenggara dan juga sebagai tolok ukur pengujian efektivitas kegiatan-kegiatan suatu organisasi di pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, perkembangan teknologi yang dilakukan secara komprehensif. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Atiningsih, *et al.*, (2019) berhasil membuktikan bahwa sistem pengendalian internal

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-kecamatan Banyudono kabupaten Boyolali.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka kerangka peikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.
Kerangka Berpikir

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam merupakan suatu dugaan atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian sampai terbukti kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Hipotesis merupakan kesimpulan atau jawaban sementara yang menyatakan pengaruh antar variabel berdasarkan landasan teori yang bersifat sementara (*Tentative*) atau masih lemah. Jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap perumusan masalah penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Variabel Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis 2 : Variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan

Hipotesis 3 : Variabel Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif dengan menggunakan metode *explanatory survey*. Penelitian ini bersifat kausal atau sebab akibat. Penelitian kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dengan menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar berbagai variabel. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (variabel yang mempengaruhi variabel terikat) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi variabel bebas). Penelitian ini akan memfokuskan dan membuktikan secara ilmiah mengenai ada atau tidaknya pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu jenis penelitian yang memandang fenomena/gejala yang dapat diklasifikasikan, teramati, terukur, dan hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2017). Pendekatan kuantitatif ini akan dimulai dengan memfokuskan pada kerangka teori yang sudah dibentuk, menurut gagasan para ahli, maupun melalui pemahaman penulis berdasarkan pengalamannya, lalu dikembangkan menjadi permasalahan yang disertai dengan pemecahannya untuk diajukan sebagai pembenaran (verifikasi) maupun untuk penilaian melalui bentuk dukungan hasil dari data empiris di lapangan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan penjelasan, pembuktian atau mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organization, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan seorang responden dari divisi organisasi yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, dengan mengambil lokasi penelitian di 3 (tiga) desa yaitu Desa Cigudeg, Desa Sukaraksa, dan Desa Wargajaya.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara) pada suatu unit analisis yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen penelitian kepada aparatur desa.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis akan mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Independen (Variabel Tidak Terikat/Bebas)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi terhadap variabel lain (Variabel Dependen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal.

a. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merupakan suatu karaktersistik yang dimiliki seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Aparatur desa adalah sumber daya manusia yang digunakan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Aparatur desa harus dapat bertanggung jawab, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga kinerja pemerintah desa dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya kekeliruan.

Indikator dari variabel kompetensi aparatur desa diperoleh dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sarifudin Mada, et al., (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo”. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam penelitian tersebut mencakup beberapa indikator kompetensi aparatur desa sebagai berikut :

- a) Pengetahuan
 - b) Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan
 - c) Keahlian teknis
 - d) Kemampuan mencari solusi
 - e) Inisiatif dalam bekerja
 - f) Keramahan dan kesopanan.
- b. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan arahan, mengawasi, dan untuk mengukur sumber daya di dalam suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, unsur-unsur sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut :

- a) Penegakan integritas dan nilai etika
 - b) Identifikasi risiko
 - c) Analisis risiko
 - d) Otorisasi yang memadai
 - e) Pemisahan fungsi yang memadai
 - f) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi
 - g) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya
2. Variabel Dependen (Variabel Terikat/Tidak Bebas)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahului (Variabel Independen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang mengharuskan seseorang menjalankan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Indikator dari variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarifudin Mada, et al., (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo”. Dalam penelitian ini mencakup indikator sebagai berikut :

- a) Kejujuran dan keterbukaan informasi
- b) Kepatuhan dalam pelaporan
- c) Kesesuaian prosedur
- d) Kecukupan informasi
- e) Ketepatan penyampaian laporan

Tabel 4.
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kompetensi Aparatur Desa (X ₁)	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan 	<i>Interval</i>
		Keterampilan (<i>Skill</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Keahlian teknis • Keterampilan mencari solusi 	
		Kemampuan (<i>Ability</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif dalam bekerja • Keramahan dan kesopanan 	
2	Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	Lingkungan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan integritas dan nilai etika 	<i>Interval</i>
		Penilaian Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi risiko • Analisis risiko 	
		Kegiatan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Otorisasi yang memadai • Pemisahan fungsi yang memadai 	
		Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi 	
		Pemantauan Pengendalian Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya 	
3	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Kejujuran dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran dan keterbukaan informasi • Kepatuhan dalam pelaporan 	<i>Interval</i>
		Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian prosedur • Kecukupan informasi • Ketepatan penyampaian laporan 	

3.5 Metode Penarikan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu agar dapat dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019: 126). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang bekerja di 3 (tiga) desa yaitu desa Cigudeg, desa Bunar, dan desa Wargajaya.

Tabel 5.
Jumlah Aparatur Desa

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kepala Urusan (Kaur) :	
	Keuangan	1 Orang
	Perencanaan	1 Orang
	Tata Usaha dan Umum	1 Orang
4	Kepala Seksi (Kasi) :	
	Pemerintah	1 Orang
	Kesejahteraan	1 Orang
	Pelayanan	1 Orang
Total		8 orang

Jumlah aparatur desa yang terdapat pada setiap desa berjumlah 8 orang, dengan demikian dari 3 (tiga) desa yang digunakan sebagai objek dalam penelitian maka jumlah untuk populasi dalam penelitian ini berjumlah 24 orang.

Sampel adalah bagian dari kuantitas dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019: 127). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel, dengan cara menggunakan teknik *sampling total*. Menurut Sugiyono (2019 : 133) *total sampling* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel ini digunakan jika jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel total adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 24 orang dengan responden yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya data untuk diteliti. Guna memperoleh data yang valid, relevan dan akurat maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner dalam penelitian ini akan diberikan kepada aparatur desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

Skala yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah Skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2019:146) Skala *Likert* merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dari seorang atau sekelompok orang mengenai suatu fenomena sosial. Seluruh kuesioner dalam penelitian ini diberikan alternatif jawaban sebanyak 4 pilihan yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak

Setuju (TS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Responden harus menggambarkan dengan mendukung pernyataan atau tidak mendukung pernyataan. Maka, Keempat jawaban tersebut memiliki porsi nilai (skor) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) STS = Sangat Tidak Setuju (1)
- b) TS = Tidak Setuju (2)
- c) S = Setuju (3)
- d) SS = Sangat Setuju (4)

Alasan penulis menggunakan kuesioner adalah :

1. Untuk memudahkan perolehan dan pengolahan data dari jawaban responden
2. Kuesioner diedarkan langsung kepada responden dalam waktu yang ditentukan
3. Pengisian kuesioner tidak memakan waktu yang lama
4. Dapat menjangkau informasi dengan waktu yang cepat

Kuesioner dalam penelitian ini diadopsi penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukannya penelitian. Kuesioner untuk variabel kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa diadopsi dari penelitian Defi (2021).

Langkah-langkah pengambilan sampel dan penyebaran kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner diberikan ke seluruh sampel
2. Peneliti memberikan jangka waktu yang telah ditentukan untuk responden mengisi kuesioner
3. Setelah batas waktu yang ditentukan dan kuesioner telah dikembalikan oleh responden kepada peneliti, maka peneliti akan melakukan tabulasi data dan pengolahan data terhadap hasil kuesioner yang diperoleh

3.7 Metode Pengolahan/Analisis data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis statistika dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Pengujian dalam penelitian ini akan dibantu dengan menggunakan *software Statistical Package for Social Science (SPSS) ver 25*.

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019: 206) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan cara mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah data yang telah dikumpulkan sebagaimana tanpa dimaksudkan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau general. Kumpulan data yg telah diperoleh akan disajikan dengan sangat ringkas dan rapih serta akan dapat memberikan memberikan informasi dari hasil kumpulan data yang telah didapatkan.

3.7.2 Uji Kualitas Data

3.7.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil dari pengukuran tersebut akan dapat menghasilkan data yang relevan atau data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *pearson corelation*, sebuah data dapat dikatakan valid apabila korelasi antar skor dari masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruknya signifikan pada level 0,05 (Ghozali, 2018).

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari seseorang terhadap pernyataan pada kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha (a)* dimana suatu instrumen dalam penelitian dapat dikatakan reliabel atau handal apabila memiliki *cronbach's alpha = 0,7* (Ghozali, 2018).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik terhadap data primer, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan juga uji heteroskedastisitas :

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal memiliki distribusi normal terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Apabila nilai *Asymp.Sig > (2-tailed) α (0.05)* maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal (Ghozali,2018). Uji normalitas menggunakan *one sample Kolmogorov-smirnov test* yang ditentukan berdasarkan taraf signifikansi.

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, maka model regresi tersebut dapat dikatakan baik (Ghozali, 2018).

Uji multikolinearitas dapat dilakukan untuk hasil regresi di dalam model yang akan diestimasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adalah dengan cara melihat nilai tolerance dan *variance inflation factor (VIF)*. Kedua ukuran ini dapat menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai tolerance dan VIF dapat membuktikan uji multikolinearitas. Jika hasil

dalam pengujian menyatakan bahwa nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF <10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi imultikolinearitas. Sebaliknya jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka akan dinyatakan terjadi imultikolinearitas (Ghozali, 2018).

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghozali (2018) mengatakan bahwa model regresi yang baik adalah yang homodkedastisitas (varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap) atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Deteksi ada atau tidaknya heterokedastis dapat dilakukan dengan cara melihat ada atau tidaknya pola tertentu yang terdapat pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi dengan Y sesungguhnya), dengan dasar analisis bahwa jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi linear berganda dilakukan dengan cara menerapkan uji persamaan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda pada dasarnya adalah studi yang membahas mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen yang memiliki tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata dari populasi atau nilai independen yang diketahui (Ghozali, 2018).

Adapun persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- X1 = Kompetensi Aparatur Desa
- X2 = Sistem pengendalian Internal
- α = Bilangan Konstanta
- β = Bilangan Koefisien
- e = Error yang ditolerir

3.7.5 Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan melalui Uji statistik F, uji statistik t, dan uji koefisien determinan (R^2) :

3.7.5.1 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi dapat diterima. Namun, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka model regresi tidak layak digunakan (Ghozali, 2018)

3.7.5.2 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parsial)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal secara individual terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Derajat signifikan yang digunakan adalah signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).

3.7.5.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Nilai Adjusted R^2 ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (Adjusted $R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila Adjusted $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila Adjusted $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi (Ghozali, 2018).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, dengan mengambil lokasi penelitian di 3 (tiga) desa yaitu Desa Cigudeg, Desa Sukaraksa, dan Desa Wargajaya.

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada aparatur desa sebagai responden. Jumlah aparatur desa yang terdapat pada setiap desa berjumlah 8 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi. Dengan demikian dari 3 (tiga) desa yang digunakan sebagai objek dalam penelitian maka jumlah untuk responden dalam penelitian ini berjumlah 24 orang.

Skala yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah Skala *Likert*. Seluruh kuesioner dalam penelitian ini diberikan alternatif jawaban sebanyak 4 pilihan yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Responden harus menggambarkan dengan mendukung pernyataan atau tidak mendukung pernyataan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti telah menyebarkan kuesioner sebanyak 24 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022 dan terkumpul pada tanggal 3 juni 2022 di 3 (tiga) desa yaitu Desa Cigudeg, Desa Sukaraksa, dan Desa Wargajaya. Semua kuesioner yang disebar dikembalikan kepada peneliti yang selanjutnya semua hasil data dapat diolah oleh peneliti. Berikut dibawah ini adalah tabel distribusi penyebaran kuesioner di 3 (tiga) desa yaitu Desa Cigudeg, Desa Sukaraksa, dan Desa Wargajaya :

Table 6.
Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	24	100%
2	Kuesioner yang kembali	24	100%
3	Kuesioner yang tidak kembali	0	100%
4	Kuesioner yang diolah	24	100%

4.2 Deskripsi Responden

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 7.
Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Pria	18	75%
Wanita	6	25%
Total	24	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel 7. di atas menunjukkan komposisi dari karakteristik responden aparatur desa dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin. Tabel tersebut memperlihatkan responden dalam penelitian ini umumnya berjenis kelamin pria sebanyak 18 orang (75%) sedangkan wanita sebanyak 6 orang (25%).

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan usia yang disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 8.
Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	%
20-24 Tahun	0	0
25-35 Tahun	7	29%
36-45 Tahun	11	46%
46-55 Tahun	5	21%
> 55 Tahun	1	4%
Total	24	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan Tabel 8. dapat diketahui komposisi dari karakteristik responden aparatur desa dalam penelitian ini berdasarkan usia. Dalam penelitian ini tidak ada responden aparatur desa dengan usia 20-24 tahun, untuk responden aparatur desa berusia 24-35 tahun sebanyak 7 orang (29%), berusia 36-45 tahun sebanyak 11 orang (46%), berusia diatas 46-55 tahun sebanyak 5 orang (21%), dan yang berusia diatas 55 tahun hanya 1 orang (4%). Kelompok usia yang memiliki frekuensi yang sangat banyak adalah responden dengan kelompok usia 36-45 tahun yaitu sebanyak 11 orang (46%).

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9.
Pengelompokan Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
SD	0	0
SMP	0	0%
SMA	19	79%
S1	5	21%
S2	0	0
>S2	0	0
Total	24	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel 9. di atas menunjukkan komposisi dari karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan pendidikan terakhir. Pada tabel tersebut dapat menggambarkan bahwa tidak ada responden dalam penelitian ini yang memiliki pendidikan terakhir SD dan SMP, responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA sebanyak 19 orang (79%), responden yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 5 orang (21%), dan dalam penelitian ini tidak ada responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 atau lebih tinggi dari S2. Kelompok pendidikan terakhir yang memiliki frekuensi yang sangat banyak adalah kelompok yang memiliki pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 19 orang (79%).

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan masa kerja yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 10.
Pengelompokan Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	%
< 5 Tahun	18	75%
5-8 Tahun	4	17%
> 8 Tahun	2	8%
Total	24	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel 10. di atas menunjukkan komposisi dari karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan masa kerja. Pada tabel tersebut dapat menggambarkan bahwa responden dalam penelitian ini yang memiliki masa kerja < 5 tahun sebanyak 18 orang (75%), responden yang memiliki masa kerja 5-8 tahun sebanyak 4 orang (17%), dan responden yang memiliki masa kerja > 8 tahun sebanyak 2 orang (8%).

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah data yang telah dikumpulkan sebagaimana tanpa dimaksudkan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau general. Kumpulan data yg telah diperoleh akan disajikan dengan sangat ringkas dan rapih serta akan dapat memberikan informasi dari hasil kumpulan data yang telah didapatkan. Berikut tabel statistik deskriptif dalam penelitian ini :

Tabel 11.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	24	18	24	20.92	2.125
X2	24	21	28	24.92	2.376
Y	24	21	28	25.17	3.031
Valid N (listwise)	24				

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan Tabel 11. di atas diketahui variabel kompetensi aparatur desa (X1) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,92 dengan nilai minimum 18 dan nilai maximum 24 dengan jumlah data sebanyak 24 data. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini menjawab setuju dan sangat setuju untuk pernyataan kompetensi aparatur desa, yang artinya penilaian terhadap variabel kompetensi aparatur desa sudah baik.

Hasil pengujian statistik menunjukkan variabel sistem pengendalian internal (X2) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24,92 dengan nilai minimum 21 dan nilai maximum 28 dengan jumlah data sebanyak 24 data. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini menjawab setuju dan sangat setuju untuk pernyataan sistem pengendalian internal, yang artinya penilaian terhadap variabel kompetensi aparatur desa sudah baik.

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25,17 dengan nilai minimum 21 dan nilai maximum 28 dengan jumlah data sebanyak 24 data. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini menjawab setuju dan sangat setuju untuk pernyataan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang artinya penilaian terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah baik.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas

Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Pearson Correlation*, sebuah data dapat dikatakan valid apabila korelasi antar skor dari masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05 (Ghozali, 2018).

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian pada kuesioner yang digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan, sebab kebenaran data yang diolah akan sangat menentukan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, uji yang digunakan menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antar skor dari variabel kompetensi aparatur desa (X1), sistem pengendalian internal (X2) dan dengan skor total variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Dasar keputusan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai r hitung $>$ nilai r tabel, maka kuesioner yang digunakan dapat dinyatakan valid
2. Jika nilai r hitung $<$ nilai r tabel, maka kuesioner yang digunakan dapat dinyatakan tidak valid.

Langkah selanjutnya yang digunakan adalah membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk $N = 24$ dengan distribusi signifikansi uji dua arah, pengujian dua arah adalah pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis arahnya masih belum diketahui sebesar 5%. Diketahui dalam penelitian ini bahwa r tabel untuk $N = 24$ adalah $df = N-2$ ($24-2$) = 22 dengan distribusi signifikansi uji dua arah 5% adalah 0.4044.

Uji validitas dilakukan untuk menguji setiap pernyataan variabel yang terdapat pada kuesioner dengan menggunakan SPSS ver 25. Jika hasil perhitungan dari setiap pernyataan masing-masing variabel menghasilkan nilai koefisien korelasi lebih besar daripada r tabel, maka hal tersebut dapat dinyatakan sebagai data yang valid. Dan jika hasil perhitungan dari setiap pernyataan masing-masing variabel menghasilkan nilai koefisien korelasi lebih kecil daripada r tabel, maka hal tersebut dapat dinyatakan sebagai data yang tidak valid. Berikut tabel uji validitas kompetensi aparatur desa dalam penelitian ini :

Tabel 12.
Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur Desa (X1)

Pernyataan	r	r tabel	Keterangan
X1.1	0,848	0,404	Valid
X2.2	0,811	0,404	Valid
X1.3	0,705	0,404	Valid
X1.4	0,889	0,404	Valid
X1.5	0,785	0,404	Valid
X1.6	0,846	0,404	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 12. Di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi r hitung dari setiap pernyataan pada variabel kompetensi aparatur desa lebih besar dari nilai r tabel 0,404 sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada variabel kompetensi aparatur desa dalam kuesioner dinyatakan telah valid dan dapat digunakan sebagai data dalam penelitian. Berikut tabel uji validitas sistem pengendalian internal dalam penelitian ini :

Table 13.
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X2)

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0,754	0,404	Valid
X2.2	0,674	0,404	Valid
X2.3	0,686	0,404	Valid
X2.4	0,741	0,404	Valid
X2.5	0,721	0,404	Valid
X2.6	0,676	0,404	Valid
X2.7	0,683	0,404	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil Tabel 13. di atas menunjukkan hasil nilai koefisien korelasi r_{hitung} dari setiap pernyataan pada variabel sistem pengendalian internal lebih besar dari nilai r_{tabel} 0,404 sehingga semua pernyataan pada variabel sistem pengendalian internal dalam kuesioner dinyatakan telah valid. Berikut tabel uji validitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini :

Tabel 14.
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Y.1	0,856	0,404	Valid
Y.2	0,844	0,404	Valid
Y.3	0,816	0,404	Valid
Y.4	0,841	0,404	Valid
Y.5	0,899	0,404	Valid
Y.6	0,874	0,404	Valid
Y.7	0,959	0,404	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel 14. di atas menunjukkan hasil nilai koefisien korelasi r_{hitung} dari setiap pernyataan pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa lebih besar dari nilai r_{tabel} 0,404 sehingga semua pernyataan pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam kuesioner dinyatakan telah valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari seseorang terhadap pernyataan pada kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* (α) dimana suatu instrumen dalam penelitian dapat dikatakan reliabel atau handal apabila memiliki *cronbach's alpha* = 0,7 (Ghozali, 2018). Berikut tabel uji reliabilitas dalam penelitian ini :

Tabel 15.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	0,802	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,775	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0,803	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 15. di atas menunjukkan nilai dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,7. Variabel Kompetensi Aparatur Desa memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,802. Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,775. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,803. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dari masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan *one sample Kolmogorov-smirnov test* yang ditentukan berdasarkan taraf signifikansi. Dasar keputusan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* $> \alpha$ (0,05) maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.
2. Apabila nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* $< \alpha$ (0,05) maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal.

Tabel 16.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15406762
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.062
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 16. menunjukkan nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar $0,200 > \alpha (0,05)$ dan dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas sehingga data tersebut berdistribusi secara normal.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilakukan untuk hasil regresi di dalam model yang akan diestimasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adalah dengan cara melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini dapat menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai tolerance dan VIF dapat membuktikan uji multikolinearitas. Dasar keputusan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika hasil dalam pengujian menyatakan bahwa nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka akan dinyatakan terjadi multikolinearitas.

Tabel 17.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)		
	X1	.958	1.044
	X2	.958	1.044

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data

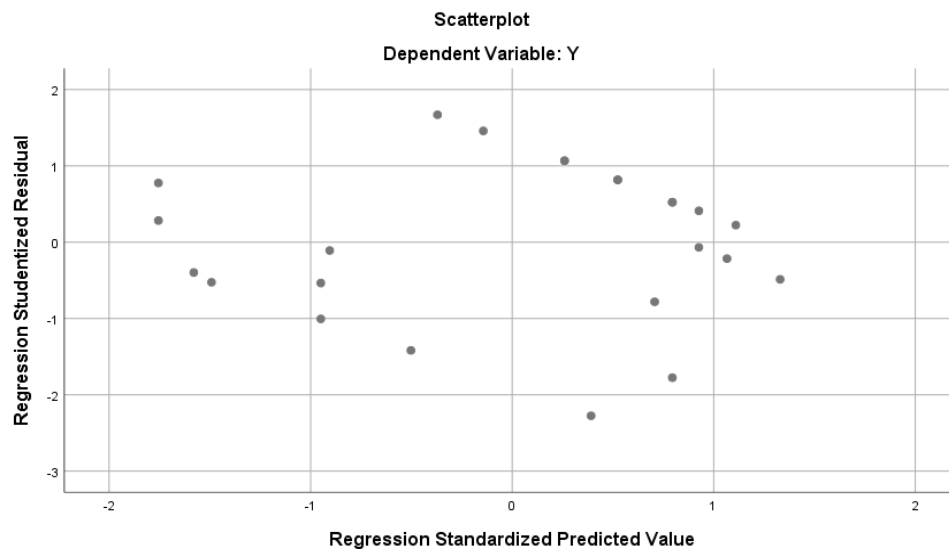
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 17. di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada interaksi variabel kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghozali (2018) mengatakan bahwa model regresi yang baik adalah yang homodkedastisitas (varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap) atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Deteksi ada atau tidaknya heterokedastis dapat dilakukan dengan cara melihat ada atau tidaknya pola tertentu yang terdapat pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi dengan Y sesungguhnya). Dengan dasar analisis yang digunakan sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* menunjukkan penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola tertentu yang teratur seperti pola bergelombang, melebar kemudian menyempit dan melebar kembali atau titik-titik mengumpul di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik data pada grafik tersebut menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda membahas mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen yang memiliki tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata dari populasi atau nilai independen yang diketahui. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 18. berikut :

Tabel 18.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.684	5.749		.293	.772
	X1	.094	.196	.076	.478	.638
	X2	.860	.199	.684	4.317	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS vers 25 pada Tabel 18. dapat diketahui model persamaan regresi linear berganda yang diperoleh, yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 1,684 + 0,094 X_1 + 0,860 X_2$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) = 1,684 artinya jika tidak ada variabel independen yang terdiri dari kompetensi aparatur desa (X_1) dan sistem pengendalian internal (X_2), maka variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) adalah sebesar 1,684.
2. Nilai Koefisien X_1 (β_1) = 0,094 menunjukkan variabel kompetensi aparatur desa (X_1) memiliki nilai koefisien yang positif. Sehingga kompetensi aparatur desa (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). artinya apabila kompetensi aparatur desa ditingkatkan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan ikut meningkat.
3. Nilai Koefisien X_2 (β_2) = 0,860 menunjukkan variabel sistem pengendalian internal (X_2) memiliki nilai koefisien yang positif. Sehingga sistem pengendalian internal (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). artinya sistem pengendalian internal ditingkatkan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan ikut meningkat.

4.7 Pengujian Hipotesis

4.7.1 Uji Statistik F (Uji Signifikan Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara simultan. Derajat signifikansi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi dapat diterima.
2. jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka model regresi tidak layak digunakan

Apabila hasil dari uji F memiliki pengaruh yang signifikan maka model regresi ini dapat dilanjutkan untuk melakukan uji selanjutnya yaitu uji t (parsial). Sebaliknya, apabila hasil dari uji F tidak memiliki pengaruh yang signifikan maka uji t (parsial) tidak perlu dilakukan. Hal tersebut tidak perlu dilakukan dikarenakan variabel independen (kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal) tidak ada yang mempengaruhi variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa).

Tabel 19.
Hasil Uji Statistik F (Uji Signifikan Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	104.613	2	52.307	10.293	.001 ^b
	Residual	106.720	21	5.082		
	Total	211.333	23			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 19. Hasil dari uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < \text{dari } 0,05$ yang artinya hasil dari uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk dapat mengetahui variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen maka dapat dilakukan dengan uji t (parsial).

4.7.2 Uji Stastik t (Uji Signifikasi Parsial)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal secara individual terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dasar keputusan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai t signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial).
2. Jika nilai t signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 20.
Hasil Uji Statistik t (Uji Signifikasi Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.684	5.749		.293	.772
	X1	.094	.196	.076	.478	.638
	X2	.860	.199	.684	4.317	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 20. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan, sistem pengendalian internal secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk dapat melihat signifikansi pengaruh pada masing-masing variabel dapat dilihat dengan cara melakukan perbandingan nilai signifikansi dari masing-masing variabel dengan 0,05. Jika nilai signifikansi $< 0,005$ maka terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial), dan jika nilai t signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Variabel kompetensi aparatur desa memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,638 >$ dari $0,05$. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk variabel sistem pengendalian internal memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,000 <$ dari $0,05$ serta nilai koefisien regresi $0,094$. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4.7.3 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari variasi variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal untuk dapat memberikan penjelasan terhadap variasi variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Range nilai koefisien determinasi antara nol (0) sampai dengan satu (1). Nilai yang mendekati satu artinya variabel independen mampu secara keseluruhan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut dalam uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) :

Tabel 21.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.704 ^a	.495	.447	2.25431

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 21. didapatkan nilai *Adjusted R*² sebesar 0,447 yang artinya pengaruh dari variabel independen (kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa) sebesar 44,7%. Sedangkan selebihnya sebesar 55,3% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS vers 25, dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan hasil pengujian tersebut maka hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa **ditolak**.

Kompetensi aparatur desa dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik aparatur desa seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya, sehingga aparatur tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional, efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas kerja (Defi,2021).

Aparatur desa menjadi unsur penyelenggara desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang cukup memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintah. Dalam mencapai tujuan organisasi, aparatur desa harus memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup baik untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan semaksimal mungkin. Dengan adanya kompetensi akan menunjukkan karakteristik, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas profesionalisme dalam melakukan pekerjaan.

Oleh karena itu peran aparatur yang berkompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan manfaat yang optimal untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan dalam mengelola keuangan desa tidak terlepas dari aspek pengelola keuangan yang dikelola oleh pihak yang memiliki manajemen yang baik, maka kompetensi aparatur yang terlibat dalam urusan mengelola keuangan desa sangat perlu diperhatikan.

Aparatur desa yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sangat diperlukan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan desa, karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa akan dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut.

Namun aparatur desa belum mampu untuk mencapai kinerja yang baik dan tinggi dalam pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena aparatur desa tidak memiliki karakteristik yang cukup baik. Aparatur desa yang berkompeten memiliki karakteristik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang baik. Selain itu, dalam mengelola keuangan desa diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyatama, *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola alokasi dana desa (ADD) yang terbilang cukup.

Selain itu, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) membuktikan bahwa kompetensi aparatur pengelola keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mada, *et al.*, (2017); dan Tarjo (2019) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi aparatur pengelola keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.8.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS vers 25, dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan hasil pengujian tersebut maka hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa **diterima**.

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pengendalian atas kegiatan yang dilakukan sangat diperlukan. Fungsi sistem pengendalian itu sendiri digunakan sebagai tolak ukur untuk dapat menguji efektivitas dalam penyelenggaraan suatu aktivitas di dalam organisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, dan kejelasan kriteria dalam pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi. Sistem Pengendalian

Internal dianggap sebagai suatu rancangan sistem untuk digunakan sebagai suatu kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi dalam mencapai tujuan.

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai APBD. Pengawasan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan menilai dan meningkatkan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh aparatur untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Menurut Karyadi (2018) Pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang dirancang untuk dapat memberikan sebuah jaminan guna tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektifitas dan efisien dalam operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan hukum yang berlaku. Para manajer harus dapat menilai sistem internal agar dapat bertanggung jawab atas pengendalian internal terhadap pengelolaan laporan keuangan. Perancangan sistem merupakan hal yang penting dalam memahami pengendalian internal agar dapat menilai resiko dan menurunkan resiko dalam mencapai tujuan.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aziiz dan Prastiti (2019) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi akuntabilitas dana desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Karyadi (2019); dan Mualifu, *et al.*,(2019) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.8.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah variabel kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS vers 25, dari hasil uji hipotesis yang telah

dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan hasil pengujian tersebut maka hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa variabel kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa **diterima**.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil pengujian dan pembahasan pada penelitian ini di bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal itu ditunjukkan oleh hasil dari uji t (parsial) dimana kompetensi aparatur desa memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,638 >$ dari $0,05$ atau nilai t_{hitung} sebesar $0,478 <$ dari t_{tabel} $2,080$. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. Hal ini berarti aparatur desa belum memiliki karakteristik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk mencapai kinerja yang baik dan tinggi dalam pekerjaannya untuk dapat memberikan manfaat yang optimal untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal itu ditunjukkan oleh hasil dari uji t (parsial) dimana sistem pengendalian internal memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,000 <$ dari $0,05$ atau nilai t_{hitung} sebesar $4,317 >$ dari t_{tabel} $2,080$. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini berarti sistem pengendalian internal berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, sehingga sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang penting sebagai tolak ukur untuk menguji efektivitas penyelenggaraan suatu aktivitas di dalam organisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, dan kejelasan kriteria dalam pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi. Sistem pengendalian internal sangat diperlukan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal itu ditunjukkan oleh hasil dari uji F dimana sistem pengendalian internal memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,000 <$ dari $0,05$ atau nilai F_{hitung} sebesar $10,293 <$ dari F_{tabel} $3,440$. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini berarti kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan pengambilan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah :

1. Aparatur desa di Desa Cigudeg, Sukaraksa dan Wargajaya sebaiknya meningkatkan kompetensi dengan memiliki karakteristik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang baik guna mencapai kinerja yang baik dan tinggi dalam pekerjaannya untuk dapat memberikan manfaat yang optimal untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan dan akuntabel, dimana nanti hasil akhir dari semua kegiatan dan aktivitas penyelenggaraan pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sehingga akan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih luas. Peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang sama dengan penelitian ini diharapkan agar menambah variabel bebas yang akan diteliti seperti variabel partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan teknik pengumpulan data seperti dengan melakukan wawancara langsung lebih lanjut terhadap aparatur desa untuk mendapatkan tambahan data yang lebih mendalam terkait jawaban responden mengenai pengelolaan keuangan desa. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mempertimbangkan waktu mengenai jadwal penelitian seperti menghindari melakukan penelitian pada bulan-bulan akhir tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, I. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang
- Ardhianto, W. N., & SHI, M. (2019). *Buku Sakti Pengantar Akuntansi*. Anak Hebat Indonesia.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14–25.
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160–169.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, D. S. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6, 334–344.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Bogor.
- Crowe, Jessica. 2011. New Challengers for Leadership and Accountability in Local Public Services in England. *International Journal of Leadership in Public Services*, Vol. 7 Iss 3. pp. 206 – 217.
- Daulay, D. R. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. In *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Fadil, M. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. In *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Ferina, I. S., Burhanudin, B., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321–336.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hevesi, G. Alan. (2005). *Standards for Internal Control in New York State Government*. www.osc.state.ny.us.

- Ladapase, L. I. M. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. In *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Lubis, P. S. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PD.Pasar Kota Medan. In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1).
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 49–59.
- Muh, K. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Studi di Kecamtan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 7(2), 34–46.
- Napisah, L. S. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan.
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 68–81.

- Putri, K. A. (2020). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. *Skripsi*. Universitas Pakuan
- Safitri, N. H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
- Sedarmayanti. (2014). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, H. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. In *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Tarjo, T. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 5(2), 331–346.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Weygandt, Kimmel and Kieso. (2013). *Financial Accounting: IFRS Edition*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Wibowo, R. P. (2018). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 02(02), 1–20.
- Yesinia, N. ida, Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112.

Yunita, A., & Belitung, B. (2019). Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bangka Dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif. *Tirtayasa Ekonomika*, *14*(1), 66–78.

Zamzami, F., & Nusa, N. D. (2017). *Akuntansi Pengantar 1*. UGM PRESS.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian



**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**(STUDI EMPIRIS DI DESA CIGUDEG, SUKARAKSA, DAN WARGAJAYA
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR)**

Kusioner Penelitian

Diajukan oleh :

Dian Rahmanoviyani

0221 18 094

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

MEI 2022

Bogor, 24 Mei 2022

Kepada Yth,
Bpk/Ibu/Sdr/i Responden
Di Tempat

Dengan Hormat Saya adalah Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Pakuan Bogor, sedang melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Di Desa Cigudeg, Sukaraksa, dan Wargajaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor)**", Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Nama : Dian Rahmanoviyani

NPM : 022118094

Fakultas/Jurusan/Semester : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi/VII

Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu/Sdri sangat berarti demi terselesaikannya penelitian ini, dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja.

Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akunatabilitas pengelolaan keuangan desa. Data yang diperoleh hanya akan digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu/Sdr/i bekerja, sehingga saya akan menjaga kerahasiaan data-data tersebut sesuai dengan etika penelitian.

Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini.

Mengetahui

Ketua Komisi Pembimbing

Hormat Saya

Peneliti

(Dr. H. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CSEP., QIA)

(Dian Rahmanoviyani)

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**(STUDI EMPIRIS DI DESA CIGUDEG, SUKARAKSA, DAN WARGAJAYA
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR)**

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : _____ (Tidak Wajib Diisi)
2. Jenis Kelamin : L / P
3. Usia : a. 20-24 Tahun b. 25-35 Tahun
c. 36-45 Tahun d. 46-55 Tahun
e. > 55 Tahun
4. Pendidikan terakhir : a. SD b. SMP
c. SMA d. S1
e. S2 f. > S2
5. Jabatan sekarang : _____
6. Masa Kerja : _____

II. PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari diminta untuk memberikan tanda checklist (✓) pada pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/Saudari yang dianggap benar. Diharapkan setiap pertanyaan hanya memiliki satu jawaban. Berikut keterangan alternative jawaban dan skor :

- a. STS = Sangat Tidak Setuju (1)
- b. TS = Tidak Setuju (2)
- c. S = Setuju (3)
- d. SS = Sangat Setuju (4)

Indikator Variabel *Kompetensi Aparatur Desa (X₁)*

No	Daftar Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Pengetahuan dan keahlian yang cukup dapat menciptakan tata kelola desa yang lebih baik				
2	Aparatur desa selalu aktif mencari informasi tugas dan pekerjaan				
3	Kemampuan mengelola keuangan desa harus dimiliki oleh aparatur desa				
4	Aparatur desa dapat menemukan solusi yang tepat untuk kendala yang dihadapi di tempat bekerja				
5	Aparatur desa saling mendukung dalam menjalankan tugas dan misi				
6	Aparatur desa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ramah dan sopan				

Indikator Variabel *Sistem Pengendalian Internal (X₂)*

No	Daftar Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Pemerintah desa memiliki kode etik				
2	Kepala Desa harus memberikan contoh perilaku sesuai dengan kode etik yang ada				
3	Penerapan pengendalian internal atas risiko yang mungkin akan dihadapi				
4	Semua transaksi dan aktivitas selalu didukung dengan persetujuan pihak yang berwenang				
5	Adanya pemisahan tugas yang memadai				
6	Pemerintah desa menerapkan sistem informasi untuk memenuhi tanggung jawab				
7	Pada waktu yang tidak ditentukan, Pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi yang ada				

Indikator Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	Daftar Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Anggaran pemerintah desa disusun dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi				
2	Pengawasan selalu dilakukan terhadap kegiatan/program Pemerintah Desa				
3	Dalam pengajuan anggaran, harus disertai dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar penyusunan APBDes				
4	Pelaksanaan belanja desa didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai peraturan perundang-undangan				
5	Pemerintah desa telah menerapkan prosedur administrasi untuk mengelola keuangan desa				
6	Pemerintah desa memiliki sistem informasi akuntansi yang tepat untuk mengelola keuangan desa				
7	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota tepat waktu				

Lampiran 2. Dokumentasi Penyebaran Kuesioner



Lampiran 3. Data Mentah Penelitian

Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur Desa (X1)

KOMPETENSI APARATUR DESA (X1)						TOTAL X1
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
3	4	3	3	3	3	19
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	4	4	4	21
3	4	3	4	4	4	22
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	4	3	19
4	4	4	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
3	3	4	3	3	3	19
3	3	3	3	3	3	18
3	3	4	3	3	3	19
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	4	4	4	21
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	3	3	22
3	3	3	4	4	4	21

Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X2)

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (X2)							TOTAL X2
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	
3	4	3	4	3	3	4	24
3	3	3	3	3	3	3	21
4	3	3	3	4	3	3	23
4	4	3	4	4	4	4	27
3	3	3	3	3	3	3	21
4	3	3	3	4	3	3	23
3	3	3	3	3	3	3	21
4	3	3	3	4	3	3	23
4	4	4	4	4	3	4	27
4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	3	4	3	3	4	25
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	3	4	3	4	26
4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	4	3	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	3	4	4	3	4	26
4	3	4	4	4	3	4	26
4	4	3	3	4	4	4	26
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	3	4	4	4	4	27
3	4	3	3	3	4	4	24
4	3	4	4	4	4	4	27

Lampiran 4. Hasil Output SPSS 25

Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur Desa (X1)

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1
X1.1	Pearson	1	.837**	.837**	.591**	.414*	.478*	.848**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.044	.018	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24
X1.2	Pearson	.837**	1	.657**	.580**	.410*	.486*	.811**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.047	.016	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24
X1.3	Pearson	.837**	.657**	1	.410*	.240	.314	.705**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.047	.258	.135	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24
X1.4	Pearson	.591**	.580**	.410*	1	.832**	.919**	.889**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.002	.003	.047		.000	.000	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24
X1.5	Pearson	.414*	.410*	.240	.832**	1	.919**	.785**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.044	.047	.258	.000		.000	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24
X1.6	Pearson	.478*	.486*	.314	.919**	.919**	1	.846**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.018	.016	.135	.000	.000		.000
	N	24	24	24	24	24	24	24
X1	Pearson	.848**	.811**	.705**	.889**	.785**	.846**	1
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	24	24	24	24	24	24	24

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi Aparatur Desa (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	24	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	24	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.802	7

Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X2)

		Correlations							
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.293	.488*	.435*	.900**	.338	.348	.754**
	Sig. (2-tailed)		.165	.016	.034	.000	.106	.096	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
X2.2	Pearson Correlation	.293	1	.200	.580**	.201	.438*	.567**	.674**
	Sig. (2-tailed)	.165		.349	.003	.345	.032	.004	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
X2.3	Pearson Correlation	.488*	.200	1	.438*	.542**	.410*	.306	.686**
	Sig. (2-tailed)	.016	.349		.032	.006	.047	.147	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
X2.4	Pearson Correlation	.435*	.580**	.438*	1	.330	.343	.497*	.741**
	Sig. (2-tailed)	.034	.003	.032		.116	.101	.014	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
X2.5	Pearson Correlation	.900**	.201	.542**	.330	1	.406*	.260	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000	.345	.006	.116		.049	.219	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
X2.6	Pearson Correlation	.338	.438*	.410*	.343	.406*	1	.367	.676**
	Sig. (2-tailed)	.106	.032	.047	.101	.049		.078	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
X2.7	Pearson Correlation	.348	.567**	.306	.497*	.260	.367	1	.683**
	Sig. (2-tailed)	.096	.004	.147	.014	.219	.078		.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
X2	Pearson Correlation	.754**	.674**	.686**	.741**	.721**	.676**	.683**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	24	24	24	24	24	24	24	24

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	24	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	24	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.775	8

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

		Correlations							
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.548**	.567**	.842**	.775**	.730**	.742**	.856**
	Sig. (2-tailed)		.006	.004	.000	.000	.000	.000	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
Y.2	Pearson Correlation	.548**	1	.657**	.591**	.707**	.812**	.837**	.844**
	Sig. (2-tailed)	.006		.000	.002	.000	.000	.000	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
Y.3	Pearson Correlation	.567**	.657**	1	.580**	.676**	.657**	.829**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000		.003	.000	.000	.000	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
Y.4	Pearson Correlation	.842**	.591**	.580**	1	.753**	.591**	.749**	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.003		.000	.002	.000	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
Y.5	Pearson Correlation	.775**	.707**	.676**	.753**	1	.707**	.845**	.899**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
Y.6	Pearson Correlation	.730**	.812**	.657**	.591**	.707**	1	.837**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.002	.000		.000	.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
Y.7	Pearson Correlation	.742**	.837**	.829**	.749**	.845**	.837**	1	.959**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	24	24	24	24	24	24	24	24
Y	Pearson Correlation	.856**	.844**	.816**	.841**	.899**	.874**	.959**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	24	24	24	24	24	24	24	24

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	24	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	24	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.803	8

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	24	18	24	20.92	2.125
X2	24	21	28	24.92	2.376
Y	24	21	28	25.17	3.031
Valid N (listwise)	24				

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15406762
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.062
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

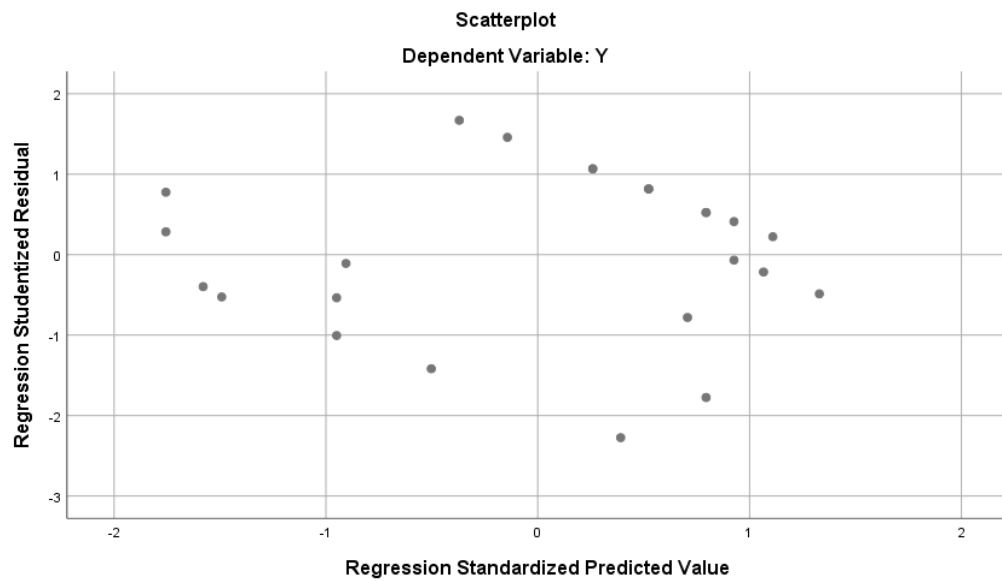
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.958	1.044
	X2	.958	1.044

a. Dependent Variable: Y

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil Analisis Regresi Linear

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.684	5.749		.293	.772
	X1	.094	.196	.076	.478	.638
	X2	.860	.199	.684	4.317	.000

a. Dependent Variable: Y

Hasil Uji Statistik F (Uji Signifikan Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	104.613	2	52.307	10.293	.001 ^b
	Residual	106.720	21	5.082		
	Total	211.333	23			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil Uji Statistik t (Uji Signifikasi Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.684	5.749		.293	.772
	X1	.094	.196	.076	.478	.638
	X2	.860	.199	.684	4.317	.000

a. Dependent Variable: Y

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.704 ^a	.495	.447	2.25431

a. Predictors: (Constant), X2, X1